

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Definisi Operasional.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI TEORI NEGARA HUKUM, TEORI TRIAS POLITICA, TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN

2.1. Teori Negara Hukum.....	18
2.1.1. Negara Hukum Konsep Barat	19
2.1.2. Negara Hukum Sosialis.....	21
2.1.3. Nomokrasi islam	22
2.1.4. Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	25
2.2. Teori Trias Politika.....	28
2.3. Teori Kekuasaan Kehakiman	35
2.3.1. Mahkamah Agung.....	39
2.3.2. Mahkamah Konstitusi	42
2.3.3. Komisi Yudisial	44

BAB III	KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN KOMISI YUDUSIAL (KY) DALAM PROSEDUR PEREKRUTAN HAKIM AGUNG (HA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KOMISI YUDISIAL	
3.1.	Kewenangan Komisi Yudisial terkait perekrutan Hakim Agung	51
3.2.	Tugas Komisi Yudisial dalam proses perekrutan Hakim Agung	53
3.3.	Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemilihan Hakim Agung	68
3.4.	Proses pemilihan Hakim Agung	70
3.5.	Tata Tertib cara Pengujian Fit and Propertest Yang dilakukan Oleh DPR dalam Perekrutan Hakim Agung	74
BAB IV	IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XI/2013 TERKAIT DENGAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEREKRUTAN HAKIM AGUNG	
4.1.	Resume Putusan	75
4.1.1.	Pokok Perkara	77
4.1.2.	Petitum	87
4.1.3.	Penjelasan Pemerintahan atas permohonan pengujian Undang-Undang yang dimohonkan oleh para pemohon	89
4.1.4.	Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI).....	91
4.1.5.	Pertimbangan Hakim	94
4.2.	Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013	112
BAB V	PENUTUP	
1.1.	Kesimpulan.....	117
1.2.	Saran.....	119
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	